

AN ANALYSIS ON THE CONSISTENCY OF INDONESIA'S MEASURE ON INVESTMENT IN SERVICES WITH THE INDONESIA-JAPAN ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT (IJEPA) IN RELEVANCE TO GENERAL AGREEMENT ON TRADE IN SERVICES (GATS) UNDER WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO)

By:

Nadia Handayani¹ and M. Hawin²

ABSTRACT

This research is aimed for the sustainable development of Indonesia's service trade system with Japan by maintaining the consistency of domestic regulations governing the market for services trade. And gives a further understanding on the consistency of Indonesia's measure with IJEPA in relevance to the GATS.

The method of this research was empirical-legal normative. It combined library research in UGM Centre Library, UGM Law Library, and Ministry of Trade Library with field research conducted by interviewing Mrs. Devi and Mrs. Astari from Indonesia Services Dialogue, Mr. Riyatno and Mr. Nova from Investment Coordinating Board of Indonesia, Mr. Jason, Mr. Afri and Mr. Erwin from Trade Advocacy Bureau, Mrs. Rini and Mrs. Dewi from Directorate Trade in Services Negotiation, Ministry of Trade. The data was obtained, then analyzed using the qualitative method.

By analysing the measures on investment in services that can be maintained by Indonesia under Annex 4 of IJEPA and measures maintained under 2016 Negative Investment List, one can understand whether Indonesia's measure has been consistent with the IJEPA. Moreover, by analysing the schedule of commitment of Indonesia in IJEPA and WTO with the General Agreement on Trade in Services, one can understand whether the differences of commitments are violating with the most-favoured nation treatment or not. Based on this analysis, the conclusions were that several measures maintained by Indonesia under the 2016 Negative Investment List are not consistent with the IJEPA as it violates the national treatment obligation preserved within Article 60 of the IJEPA. In regards to the differences of Indonesia's commitments, the violation of MFN obligation is justified under Article V and Article XIX of the GATS.

Keywords: IJEPA, Investment in Services, GATS, Schedule of Commitment (SoC), WTO

¹ Student of the Faculty of Law Universitas Gadjah Mada (S-1 IUP 2014).

² Lecturer of the Department of Business Law, the Faculty of Law Universitas Gadjah Mada.

Analisa Konsistensi Kebijakan Indonesia terkait Investasi Bidang Jasa dalam Kerangka Perjanjian Kerja Sama Kemitraan Ekonomi Jepang-Indonesia (IJEPA) dan Relevansinya terhadap Perjanjian Umum mengenai Perdagangan Jasa (GATS) Dibawah Peraturan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO)

Oleh:

Nadia Handayani¹ dan M. Hawin²

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk pengembangan berkelanjutan system perdagangan jasa Indonesia dengan Jepang dengan mempertahankan konsistensi peraturan dalam negeri yang mengatur pasar untuk perdagangan jasa. Serta memberikan pemahaman lebih lanjut terkait konsistensi kebijakan Indonesia dengan IJEPA dan relevansinya dengan GATS.

Metode penelitian ini adalah yuridis normatif empiris. Penelitian ini mengkombinasikan penelitian kepustakaan di Perpustakaan Pusat UGM, Perpustakaan FH UGM, Perpustakaan Kementerian Perdagangan dengan penelitian lapangan berupa wawancara kepada Ibu Devi dan Ibu Astari dari Dialog Perdagangan Jasa Indonesia, Bpk. Riyatno dan Bpk. Nova dari Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bpk. Jason, Bpk. Afri and Bpk. Erwin dari Biro Advokasi Perdagangan, Ibu Rini and Ibu Dewi dari Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa, Kementerian Perdagangan. Data yang didapatkan kemudian dianalisis dengan metode kualitatif.

Dengan menganalisa kebijakan terkait investasi dalam bidang jasa yang dapat dipertahankan Indonesia dalam Annex 4 IJEPA dan kebijakan yang dipertahankan dalam Daftar Negatif Investasi Indonesia 2016, dapat dipahami apakah kebijakan Indonesia telah konsisten dengan IJEPA. Selain itu dengan menganalisa jadwal komitmen Indonesia dalam IJEPA dan WTO dengan Perjanjian Umum mengenai Perdagangan Jasa, dapat dipahami apakah perbedaan jadwal komitmen Indonesia pada IJEPA dan WTO adalah sebagai bentuk pelanggaran kewajiban MFN. Berdasarkan hasil analisa, kesimpulan yang didapat adalah bahwa beberapa kebijakan dalam Daftar Negatif Investasi Indonesia 2016 tidak konsisten dengan IJEPA karena melanggar kewajiban perlakuan nasional yang dalam Pasal 60 IJEPA. Sehubungan dengan perbedaan komitmen Indonesia, pelanggaran kewajiban MFN dibenarkan berdasarkan Pasal V dan Pasal XIX GATS.

Kata Kunci: IJEPA, Investasi Bidang Jasa, GATS, Jadwal Komitmen, WTO

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (S1-IUP 2014).

² Dosen pada Bagian Hukum Dagang, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.